



Kerja dari Rumah & Pembatasan Mobilitas Diberlakukan

JAKARTA—Pemerintah mulai memberlakukan kebijakan kerja dari rumah atau *work from home* (WFH) bagi aparaturnya sipil negara (ASN) dan swasta sekaligus efisiensi mobilitas mulai Rabu (1/3). Pemerintah daerah di DIY, diawali Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja sudah merancang kebijakan penghematan.

Dary Saputra, Stefan Yudhanegara, & Kimi Lupon
redaksi@harianjogja.com

Kebijakan nasional itu dimunculkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada konferensi pers secara daring, Selasa (31/3). Langkah ini merupakan tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto yang disebut *9 butir Transformasi Budaya Kerja Nasional* sekaligus kebijakan yang mencakup sektor energi. "Kebijakan ini mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah dua bulan pelaksanaan," terang Airlangga.

Pengaturannya akan dibedakan berdasarkan ASN maupun swasta mengikuti surat edaran (SE) dari Menteri Pelayanannya Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Dalam Negeri. Pengaturan WFH untuk ASN akan dipertinci SE Mestyan RB. WFH ini akan

Pemkot Jogja menjamin penyediaan jam kerja tidak akan mengganggu layanan publik.

WFH untuk swasta akan disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan merujuk pada karakteristik masing-masing sektor usaha.

berlaku untuk instansi pusat dan daerah selama satu hari dalam seminggu yakni hari Jumat. Selain itu, diberlakukan efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebesar 50% kecuali operasional dan kendaraan listrik. Masyarakat didorong menggunakan transportasi

publik. Khusus untuk daerah ada imbauan untuk penambahan jumlah hari, durasi waktu dan cakupan ruas dan jalan dalam *car free day* sesuai karakter masing-masing daerah dan akan diatur SE Menteri Dalam Negeri, "terang Airlangga.

WFH untuk swasta akan disesuaikan dengan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan merujuk pada karakteristik masing-masing sektor usaha.

"Pengaturan melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan juga mencakup efisiensi penggunaan energi di tempat kerja," terang Airlangga. Menurut Airlangga, sektor-sektor yang dikecualikan dari WFH yakni sektor publik, kesehatan, keamanan, kebersihan dan sektor strategis, seperti industri/produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, transportasi/logistik, perdagangan dan keuangan.

Airlangga Hartarto menyebut pemerintah telah melakukan prioritas dan refocusing anggaran belanja dengan potensi penghematan hingga Rp130,2 triliun.

► Halaman 10

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

JURUS PEMERINTAH KENCANGKAN IKAT PINGGANG

Pemerintah telah menetapkan kebijakan penghematan anggaran seiring dengan risiko pembengkakan defisit APBN. Imbas meroketnya harga energi global. Efisiensi yang diberi label prioritas dan refocusing anggaran belanja diyakini berpotensi menghemat hingga Rp130,2 triliun. Sasarannya adalah pos anggaran yang dianggap tidak prioritas.

WFH ASN & SWASTA

Selain penghematan anggaran, pemerintah memberlakukan kebijakan *work from home* (WFH) bagi ASN dan swasta. Kebijakan ini akan mulai berlaku Rabu (1/4). Pengaturannya akan dibedakan berdasarkan ASN maupun swasta mengikuti Surat Edaran dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Dalam Negeri.

SEKTOR PENGECUALIAN

Sektor-sektor yang dikecualikan dari WFH yakni sektor publik, kesehatan, keamanan, kebersihan dan sektor strategis, seperti industri/produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, transportasi/logistik, perdagangan dan keuangan.

PEMBATASAN KENDARAAN DINAS

Efisiensi mobilitas juga diberlakukan, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebesar 50% kecuali operasional dan kendaraan listrik, dan mendorong penggunaan transportasi publik. Selanjutnya, efisiensi perjalanan dinas perjalanan dinas dalam negeri 50% dan luar negeri hingga 70%. Pemerintah daerah diminta menambah jumlah hari, durasi waktu dan cakupan ruas dan jalan selama *car free day* sesuai karakter masing-masing daerah.

AKTIVITAS PENDIDIKAN

Kegiatan belajar mengajar bagi pendidikan dasar hingga menengah akan tetap dilaksanakan secara fisik atau luring. Asing olahraga terkait prestasi maupun ekstrakurikuler juga tidak akan dibatasi. Meski demikian, ada pembatasan untuk kegiatan belajar mengajar untuk pendidikan tinggi semester keempat ke atas sesuai dengan SE Mendikdi Saintek.

IMBAUAN KE MASYARAKAT

Masyarakat juga diminta untuk menghemat energi dalam aktivitas sehari-hari di rumah dan tempat kerja. Masyarakat diminta untuk memprioritaskan transportasi publik namun terus produktif menjalankan kegiatan ekonomi.

EFISIENSI MBG

Pemerintah memfokuskan untuk mengurangi penyulatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari enam menjadi lima hari untuk menghemat APBN. Namun, ini dikecualikan untuk sejumlah daerah tertentu.

Getty Images/Anadolu/Photo/Editorial/Markus Lohr

Kerja dari...

"Peralihan anggaran dilakukan dari belanja kurang prioritas seperti perjalanan dinas, rapat, belanja nonoperasional dan kegiatan seremonial," ujarnya.

Menurut Airlangga, kebijakan ini dilakukan sembari menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung ke masyarakat. Beberapa di antaranya adalah anggaran rehabilitasi dan konstruksi bencana Sumatra, serta percepatan dan penajaman belanja kementerian/lembaga.

"Situasi ini bukanlah hambatan melainkan momentum bagi kita untuk melakukan akselerasi untuk melakukan perubahan perilaku yang modern dan efisien. Perlu ditegaskan bahwa kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental kokoh. Stok BBM nasional dalam kondisi aman dan stabilitas fiskal tetap terjaga," kata dia.

Langkah Pemkot Jogja

Sebelum Airlangga mengumumkan 8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional, Pemkot Jogja sudah menyiapkan langkah konkret untuk menekan konsumsi energi di lingkungan birokrasi dengan membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) kendaraan dinas.

Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, mengungkapkan kebijakan ini akan diterapkan melalui sistem plafon harian. Skema tersebut menetapkan batas maksimal penggunaan BBM, yakni 5 liter per hari untuk mobil dinas dan 1 liter per hari untuk sepeda motor dinas.

Menurut Hasto, aturan ini dirancang agar kendaraan operasional benar-benar digunakan untuk kepentingan dinas, sekaligus menekan potensi pemborosan.

"Jika penggunaannya melebihi plafon karena kepentingan pribadi atau jarak rumah yang jauh, maka ASN yang bersangkutan harus menanggung sendiri kelebihannya," ujarnya, Selasa. Ia menjelaskan, penerapan plafon tersebut berpotensi

menekan belanja BBM hingga sekitar 30%. Perhitungan itu didasarkan pada pembatasan konsumsi harian yang dinilai cukup signifikan dalam mengendalikannya penggunaan energi.

"Kalau mobil kami batasi 5 liter per hari, berarti dalam empat hari sekitar 20 liter. Motor satu liter per hari, empat hari sekitar 4 liter. Itu sudah kami hitung bisa menekan konsumsi BBM cukup signifikan," katanya.

Selain efisiensi anggaran, sistem ini juga dinilai mempermudah pengawasan kendaraan dinas. Setiap ASN hanya dapat mengajukan klaim BBM sesuai dengan kuota yang telah ditentukan.

"Kalau pengawasan kendaraan dinas relatif mudah karena sudah dipatok. Mau digunakan ke mana saja, klaimnya tetap maksimal segitu. Kalau lebih, ya ditanggung pribadi," ujarnya.

Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya membangun budaya hemat energi di lingkungan Pemkot Jogja. Pemerintah juga mendorong perubahan pola mobilitas ASN agar lebih efisien dan ramah lingkungan.

ASN diimbau mulai beralih ke moda transportasi alternatif seperti sepeda maupun sepeda listrik, terutama bagi yang berdomisili dekat kantor. Menurut Hasto, langkah ini tak hanya menghemat energi, tetapi juga berkontribusi pada pengurangan emisi di kawasan perkotaan.

"Kesadaran untuk tidak terlalu sering menggunakan kendaraan berbahan bakar minyak perlu dibangun bersama. Bisa dengan bersepeda atau menggunakan sepeda listrik, itu lebih efisien," katanya.

Jam Kerja

Pemkot Jogja juga tengah menyiapkan penyesuaian jam kerja ASN pada Jumat sebagai bagian dari upaya efisiensi energi, sambil memastikan layanan publik tetap berjalan normal.

Hasto Wardoyo menyebut skema yang dibahas antara lain mempersingkat jam kerja

Jumat menjadi 5,5 jam, dengan kompensasi tambahan jam kerja pada hari lain agar total jam kerja mingguan tetap terpenuhi. "Kami sudah menghitung skenario. Jika ada pengurangan jam kerja di hari Jumat sekitar 5,5 jam, akan kami tutup di hari lain agar kualitas pelayanan tetap terjaga," ujarnya.

Hasto memastikan layanan publik tidak terganggu. Unit layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti kantor kelurahan, kemitraan, hingga Mal Pelayanan Publik (MPP), tetap akan beroperasi normal.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja, Sarwanto, menambahkan hingga saat ini belum ada surat resmi dari Kemendagri, Kementerian PAN-RB, maupun Pemda DIY. BKPSDM Kota Jogja telah menyiapkan tiga alternatif skema. *Pertama*, menambah satu jam kerja Senin-Kamis sehingga Jumat tersisa 1,5 jam. *Kedua*, menambah 30 menit kerja Senin-Kamis dengan jam kerja Jumat berakhir pukul 11.00 WIB. *Ketiga*, tetap jam kerja normal Senin-Kamis namun WFH penuh pada Jumat.

Sarwanto menegaskan, skema apapun yang diterapkan tidak akan mengurangi layanan publik. Instansi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, termasuk kelurahan, kemitraan, Dinas Perhubungan, dan MPP, tetap wajib melayani masyarakat secara tatap muka. "WFH tidak bisa dipukul rata. Instansi pelayanan publik tetap harus berjalan maksimal di kantor," katanya.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul tengah mengkaji kemungkinan penerapan kebijakan penghematan BBM di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bantul, Hermawan Setiaji, menyampaikan hingga saat ini kebijakan tersebut masih dalam tahap pembahasan internal. (David Kurniawan)

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---|--------------|-------|-----------------|
| 1. Walikota | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Man | | | |

Yogyakarta, 22 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005